

# Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Silmi Syifa Syafitri<sup>1</sup>, Syafdinal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama  
[silmi.syifa@widyatama.ac.id](mailto:silmi.syifa@widyatama.ac.id), [syafdinal.mm@widyatama.ac.id](mailto:syafdinal.mm@widyatama.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 20 Januari 2023

Disetujui : 26 Januari 2023

Dipublikasi : 30 Januari 2023

## ABSTRACT

*The background of this research is that the procurement of goods and services has a high level of vulnerability which allows inefficiency and ineffectiveness to occur and becomes a venue for fraud, one of which is the practice of bribery. The purpose of this study is to determine whether the Internal Control System and Whistleblowing System affect the prevention of procurement of goods and services fraud. The research method used is quantitative research with a survey approach. The population in this study were employees of the internal control unit division, the procurement division and the accounting division. The results of the study show that the internal control system and the whistleblowing system have an effect on preventing fraud in the procurement of goods and services either partially or simultaneously. The conclusion of this study is that the higher the level of the Internal Control System and the Whistleblowing System, the higher the level of Goods and Services Procurement Fraud Prevention.*

**Keywords:** *Internal Control System, Whistleblowing System, Fraud Prevention*

## PENDAHULUAN

Dikalangan masyarakat Indonesia mungkin masih banyak yang tidak menyadari bahwa salah satu unsur pendukung dalam kegiatan pembangunan suatu negara adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa yang baik akan mendukung perkembangan sebuah negara, karena pemakaian anggaran belanja yang tepat akan menopang pembangunan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi negara.

Fungsi *procurement* dalam suatu perusahaan merupakan salah satu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sangat vital untuk kelangsungan operasional perusahaan. Hal tersebut dikarenakan *procurement* sangat berhubungan langsung dengan kebutuhan berbagai departemen di perusahaan, mulai dari logistik, produksi, pemasaran, penjualan, informasi dan teknologi hingga keuangan yang sangat berpengaruh pada roda bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Salah satu contoh, kegiatan pembelian dalam pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat penting, mengingat pembelian merupakan aktivitas kritis karena disinilah sebagian besar uang perusahaan dihabiskan dan aktivitas ini pun menentukan apakah material yang dibeli mempunyai kualitas yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas operasional produksi. Pengadaan barang dan jasa haruslah dilaksanakan dengan tepat kualitas, kuantitas, waktu, harga dan tepat sumber pembelian.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk memungkinkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta menjadi ajang untuk melakukan *fraud* (kecurangan), salah satunya adalah praktik suap. Menurut (Saputra, 2020) menjelaskan bahwa *fraud* atau kecurangan merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin akuntansi. Pada umumnya kecurangan ini diakibatkan adanya beberapa faktor yang mendorong terjadinya *fraud* seperti *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan

*rationalization* (pembenaran). Perbuatan tersebut bertujuan guna mendapatkan *illegal advantage* (keuntungan ilegal) yang bisa berupa uang, serta barang atau jasa. Dampak yang ditimbulkan dari kecurangan ini misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian Negara, rusaknya moral karyawan bahkan dampak-dampak lainnya.

*Fraud* dalam pengadaan barang dan jasa baik yang dilakukan oleh sektor publik maupun sektor swasta, seringkali terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki para pejabat pengadaan serta pejabat terkait lainnya atau dapat pula terjadi karena kurangnya kompetensi pejabat tersebut terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Hal inipun dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan perkara pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2017 yang dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Gambar 1 Grafik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara Pengadaan Barang dan Jasa  
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Hal tersebut dibuktikan juga dengan maraknya praktik suap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh antar perusahaan BUMN. Menanggapi hal tersebut pemerintahpun telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada perusahaan BUMN berbagai ancaman risiko yang dapat merugikan perusahaan akan selalu ada. Kerugian dalam perusahaan tentu merupakan hal yang harus dapat dihindari, sangat disayangkan apabila perusahaan mengalami kerugian yang krusial hanya karena adanya kelalaian dalam suatu fungsi atau bagian. Sebagai contoh, terjadi beberapa kasus kecurangan di perusahaan BUMN terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa selama beberapa tahun terakhir, tahun 2019 bahwa KPK menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada Maret 2019 sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo (Persero) Budi Tjahjono pada tahun 2018 sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Asuransi Oil dan Gas. Kasus lainnya adalah Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi.

Berdasarkan beberapa uraian kasus di atas, maka perusahaan harus melakukan aktivitas guna mencegah terjadinya fraud. Pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan. Tentunya sudah menjadi kewajiban dari perusahaan untuk melakukan suatu pengendalian internal sebagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan bahwa setiap informasi telah akurat serta kegiatan operasional telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2019) Indonesian Chapter* dari hasil Survei *Fraud Indonesia (SFI)* menyebutkan bahwa kelemahan pengendalian internal menjadi salah satu faktor terjadinya kecurangan di perusahaan. Agar perusahaan dapat mengetahui aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan membantu manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi, maka manajemen memerlukan adanya pengendalian intern yang baik yang harus diterapkan manajemen agar aktivitas perusahaan terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Salah satu bentuk pengendalian yang dikembangkan dalam perusahaan adalah

pengendalian intern (Ikatan Akuntan Indonesia., 2002). Selain menerapkan sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* (sistem pelaporan dugaan pelanggaran) juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan terjadinya *fraud* khususnya *fraud* dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di perusahaan.

*Whistleblowing system* yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas serta evaluasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* sehingga akan mendorong partisipasi *whistleblower* untuk lebih berani bertindak dalam melaporkan kecurangan yang diketahuinya. Artinya *whistleblowing system* mampu mengurangi budaya diam menuju kearah budaya kejujuran dan keterbukaan yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jadi semakin baik penerapan *whistleblowing system* di dalam organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan (Wahyuni, 2018).

Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* ditujukan agar perusahaan tetap berada dalam jalur untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, mewujudkan visi dan misi perusahaan serta untuk menimalisir terjadinya suatu kejadian yang berpotensi merugikan perusahaan baik secara finansial maupun nonfinansial. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh (Wardana, 2017) dan (Antikasari, 2020) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya serta bagaimana pentingnya pelaksanaan sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* dalam suatu perusahaan, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Survei pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung)”.

## STUDI LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan (Fitriani, 2022), bahwa *whistleblowing system* dan kesadaran anti-*fraud* baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada OPD kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ditingkatkannya penerapan *whistleblowing system* di lingkungan OPD kota Palembang maka dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Penelitian yang dilakukan (Sulistiyo & Yanti, 2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal, manajemen risiko dan *whistleblowing system* secara Bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil koefisien determinasi juga menunjukkan pengaruhnya sebesar 100%.

Hasil penelitian yang dilakukan (Surtikanti & Larasati, 2019) bahwa *Whistleblowing System* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berada pada kategori baik. *Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mendukung teori dan hal ini membuktikan fenomena yang terjadi dimana *whistleblowing system* tidak berpengaruh secara dominan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *whistleblowing system* maka perlu diperhatikan peran sistem pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower* sehingga akan tercipta sistem *whistleblowing* yang efektif, transparan dan bertanggungjawab. Jadi dapat diartikan bahwa semakin baik *whistleblowing system* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

### Sistem Pengendalian Internal

The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dalam (Febrianty, 2020) mengemukakan bahwa: “*Internal control is a process effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: 1) Effectiveness and efficiency of operations, 2) Realibility of financial reporting, 3) Compliance with the applicable laws and regulations*”.

Dapat diartikan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan

direksi, manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk memberi keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut: 1) Efektivitas dan efisiensi operasi, 2) Realibilitas pelaporan keuangan, dan 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mulyadi dalam (Herlita, 2021) dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **Whistleblowing System**

*Whistleblowing* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) (KNKG, 2008).

*Whistleblowing system* merupakan sistem yang dirancang untuk menerima, mengkaji dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan, *whistleblowing system* yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan dugaan kecurangan, pelanggaran hukum, etika dan kode etik perusahaan yang dilakukan oleh karyawan di perusahaan. Dengan adanya *whistleblowing system Auditor Internal* dapat melakukan kegiatan pengawasan yang digunakan sebagai alat yang handal dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan perusahaan dan merupakan wujud penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di tingkat operasional (Syafdinal, 2019).

### **Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa**

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Schiavo-Campo dan McFerson sebagaimana dikutip (Labetubun, 2021) bahwa pengadaan adalah semua tahapan proses akuisisi barang atau jasa, dimulai dengan proses untuk menentukan kebutuhan dan berakhir dengan selesainya kontrak serta memiliki sistem yang mengacu pada integrasi proses, pengembangan profesional dan struktur manajemen untuk melaksanakan fungsi pengadaan.

*Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono, 2013).

Menurut *The Institute of Internal Auditors* dalam (Maulida, 2021) dijelaskan bahwa fraud merupakan setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan adanya penipuan, menyembunyian atau penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan tersebut tidak terbatas pada ancaman atau pelanggaran dalam bentuk kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak tertentu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun bisnis.

Priantara sebagaimana dikutip (Silaen, 2021) menyebutkan bahwa pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan fraud dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (fraud), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur.

Menurut (Pope, 2007) upaya-upaya pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui: 1) Memperkuat kerangka hukum, 2) Prosedur transparan, 3) Membuka Dokumen Tender, 4) Evaluasi penawaran, 5) Melimpahkan wewenang, dan 6) Pemeriksaan dan Audit Independen.

## METODE

Metode penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Menurut Sutanto dalam (Rahayu, 2020) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Menurut (Arifudin, 2019) bahwa metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non probability sampling dengan metode purposive sampling. Menurut Malhotra dalam (Arifudin, 2021) mengemukakan bahwa purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan Divisi Satuan Pengawasan Intern, Divisi Pengadaan serta Divisi Akuntansi pada PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan total 62 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil kuesioner yang disebar kepada karyawan Divisi Satuan Pengawasan Intern, Divisi Pengadaan serta Divisi Akuntansi pada PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan alat uji Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Vers.25.00. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.

## HASIL

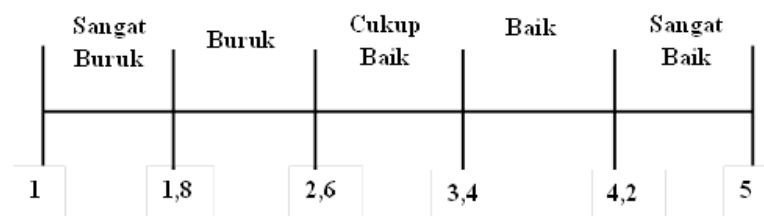
### Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, gambaran mengenai nilai variabel dilakukan dengan mendeskripsikan data masing-masing variabel melalui mean skor, yang kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan garis kontinum skoring jawaban responden. Berikut disajikan hasil rekapitulasi skor masing-masing variabel:

**Tabel 1 Tanggapan Responden Mengenai masing-masing Variabel**

No	Variabel	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor	Kategori
1	Sistem Pengendalian Internal	6583	8370	78,65	3,92	Baik
2	<i>Whistleblowing System</i>	1993	2790	71,43	3,53	Baik
3	Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	3096	4030	76,82	3,84	Baik

Sumber: Data diolah



**Gambar 2 Garis Kontinum**

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel termasuk ke dalam kategori baik karena berada dalam rentang nilai 3,4 sampai dengan 4,2.

### Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tujuan dilakukannya pengujian validitas adalah untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya serta untuk mengetahui apakah pertanyaan yang telah diterapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang telah ada. Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor jawaban responden dari setiap pertanyaan. Nilai *r* hitung dibandingkan dengan *r* tabel, apabila *r* hitung > *r* tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid.

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Menurut Ghozali dalam (Bahri, 2021) bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) > 0,70. Nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) > 0,70 dapat diartikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner berapa kali pun ditanyakan kepada responden akan menghasilkan hasil ukur yang sama. Apabila koefisien *alpha* lebih besar dari 0,70 maka butir-butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Variabel	Uji Validitas	Uji Reliabilitas
	<i>r</i> hitung	<i>Cronbach's alpha</i>
X1	0,749	0,969
X2	0,805	0,933
Y	0,754	0,922
<i>r</i> tabel = 0,2500		
Level Siginifikansi 5%		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa nilai *r* hitung > *r* tabel yang artinya seluruh variabel telah memenuhi kriteria validitas, selain itu dapat diketahui juga bahwa nilai *cronbach's alpha* > 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah memenuhi kriteria reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah model sebuah regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogrov smirnov:

**Tabel 3 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov**

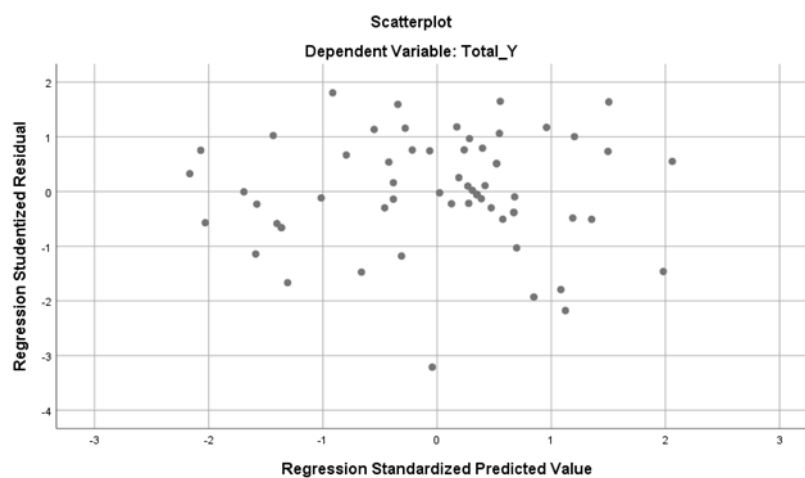
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.31404039
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.098
	Positive	.052
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Sumber: Hasil output SPSS**

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa besarnya nilai kolmogrov smirnov adalah sebesar 0,098 dengan nilai signifikansi 0,200. Nilai signifikansi yang dihasilkan oleh kolmogrov smirnov lebih dari 5% yaitu  $0,200 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, dengan kata lain model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau data distribusi normal.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*:



**Gambar 3 Uji Heterokedastisitas**  
**Sumber: Hasil output SPSS**

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 3 dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 dan di atas 0 pada sumbu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kolerasi antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Volume Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$ , maka variabel bebas tersebut tidak terdapat multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Namun jika nilai Tolerance  $< 0,10$  dan  $VIF > 10$ , maka pada variabel bebas tersebut terdapat multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

**Tabel 4 Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Total_X1	.322	3.102
	Total_X2	.322	3.102

a. Dependent Variable: Total\_Y

**Sumber: Hasil output SPSS**

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dari variabel independen menunjukkan nilai lebih dari 0,10 ( $0,322 > 0,10$ ) dan nilai VIF menunjukkan nilai kurang dari 10 ( $3,102 < 10$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi ini untuk mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara sebuah variabel independen dan sebuah variabel dependen. Selain itu, persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (dirubah-rubah). Persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan model regresi berganda.

**Tabel 5 Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.005	3.156		2.537	.014
	Total_X1	.255	.051	.525	5.012	.000
	Total_X2	.462	.119	.406	3.874	.000

a. Dependent Variable: Total\_Y

**Sumber: Hasil output SPSS**

Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian yakni sebagai berikut ( $Y = 8,005 + 0,255 X_1 + 0,462 X_2 + e$ ) yakni : 1) Nilai konstanta sebesar 8,005 artinya apabila variabel independen yaitu variabel Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa akan bernilai 8,005, 2) Nilai koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal 0,255 artinya apabila variabel Sistem Pengendalian Internal mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu *Whistleblowing System* dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa akan mengalami peningkatan sebesar 0,255. Tanda positif pada nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki arah pengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa. Artinya semakin tinggi sistem pengendalian internal maka semakin tinggi pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, serta 3) Nilai koefisien regresi *Whistleblowing System* 0,462 artinya apabila variabel *Whistleblowing System* mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu Sistem Pengendalian Internal dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa akan mengalami peningkatan sebesar 0,462. Tanda positif pada nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* memiliki arah pengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa. Artinya semakin tinggi *Whistleblowing System* maka semakin tinggi pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien Determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai (R<sup>2</sup>) yang kecil berarti menunjukkan keterbatasan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan presentase variasi dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel. Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi:



**Tabel 6 Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 <sup>a</sup>	.791	.784	3.370
a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1				
b. Dependent Variable: Total_Y				

**Sumber: Hasil output SPSS**

Berdasarkan tabel 6 yaitu hasil pengujian koefisien determinasi di atas, dapat diketahui bahwa nilai  $R_2$  adalah sebesar 0,791 yang artinya bahwa variabilitas variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* dalam penelitian ini adalah sebesar 79,1%, sedangkan sisanya sebesar 20,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t), bahwa pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis parsial menggunakan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7 Pengujian Hipotesis Secara Parsial**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.005	3.156		2.537	.014
	Total_X1	.255	.051	.525	5.012	.000
	Total_X2	.462	.119	.406	3.874	.000
a. Dependent Variable: Total_Y						

**Sumber: Hasil output SPSS**

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut: 1) Nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal adalah lebih kecil dari 0,005 yaitu  $0,000 < 0,005$ . Selain itu dapat dilihat dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,012, sedangkan t tabel sebesar 1,671 artinya  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $5,012 > 1,671$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang artinya variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap variabel Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, serta 2) Nilai signifikansi variabel *Whistleblowing System* adalah lebih kecil dari 0,005 yaitu  $0,000 < 0,005$ . Selain itu dapat dilihat dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,874, sedangkan t tabel sebesar 1,671 artinya  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $3,874 > 1,671$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang artinya variabel *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap variabel Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F), bahwa uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara simultan:

**Tabel 8 Pengujian Hipotesis Secara Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2539.787	2	1269.894	111.834	.000 <sup>b</sup>
	Residual	669.955	59	11.355		
	Total	3209.742	61			

a. Dependent Variable: Total\_Y  
 b. Predictors: (Constant), Total\_X2, Total\_X1

Sumber: Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Dapat dilihat juga berdasarkan hasil perbandingan antara nilai F hitung dan F tabel yang menunjukkan nilai F hitung adalah sebesar 111,834 sedangkan F tabel adalah sebesar 3,15 artinya  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  ( $111,834 > 3,15$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang artinya secara bersama-sama atau secara simultan variabel Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap variabel Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dapat diketahui bahwa nilai total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pertanyaan atas variabel Sistem Pengendalian Internal adalah sebesar 6583 dan skor ideal sebesar 8370, sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 78,65% dengan mean skor 3,92 termasuk ke dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) termasuk baik. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dalam variabel ini diperoleh nilai sebesar  $5,012 > 1,671$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yakni jika sistem pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dapat di perkecil. Dengan di terapkannya pengendalian internal dapat melindungi aset perusahaan dari kecurangan dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya (Zarlis, 2018). Hal ini sejalan dengan (Arifudin, 2022) yang mengemukakan bahwa kualitas pengendalian internal pada sebuah organisasi tergantung dari lembaga itu sendiri.

### Pengaruh *Whistleblowing System* (X2) terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Whistleblowing System* dapat diketahui bahwa nilai total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pertanyaan atas variabel *Whistleblowing System* adalah sebesar 1993 dan skor ideal sebesar 2790, sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 71,43% dengan mean skor 3,53 termasuk ke dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* pada PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) termasuk baik. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dalam variabel ini diperoleh nilai sebesar  $3,874 > 1,671$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , hal tersebut menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yakni salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi *fraud* adalah melalui mekanisme

*Whistleblowing System* (pelaporan pelanggaran). Dengan menerapkan *whistleblowing system* yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas serta evaluasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* sehingga akan mendorong partisipasi *whistleblower* untuk lebih berani bertindak dalam melaporkan kecurangan yang diketahuinya. Artinya *Whistleblowing System* mampu mengurangi budaya diam menuju kearah budaya kejujuran dan keterbukaan yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jadi semakin baik penerapan *Whistleblowing System* di dalam organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan (Wahyuni, 2018).

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Whistleblowing System (X2) terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat diketahui nilai F hitung adalah sebesar 111,834 sedangkan F tabel adalah sebesar 3,15 artinya F hitung > F tabel (111,834 > 3,15), hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yakni untuk meminimalisir tindakan *fraud* khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka diperlukan sistem pengendalian internal perusahaan yang baik. Sistem pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan tujuan untuk mendorong kegiatan pengadaan barang dan jasa ke arah yang lebih efektif dan efisien, mengurangi risiko kehilangan dan kerugian, membantu meyakinkan keandalan dalam pelaporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Selain sistem pengendalian internal, penerapan *whistleblowing system* dalam perusahaan pun penting untuk dilaksanakan guna mencegah terjadinya *fraud*. Selain itu, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan (Juhadi, 2020) juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* (kecurangan).

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan diterapkannya *Whistleblowing System*. *Whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Internal *whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai mengetahui kecurangan yang dilakukan pegawai lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan, eksternal *whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan kemudian memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika *Whistleblowing* diterapkan dengan baik oleh pegawai, maka pencegahan *fraud* semakin tinggi (Tanjung, 2020).

### **KESIMPULAN**

Dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga semakin tinggi tingkat Sistem Pengendalian Internal maka semakin tinggi tingkat Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, 2) *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga semakin tinggi tingkat *whistleblowing system* maka semakin tinggi tingkat Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, serta 3) Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* secara simultan atau bersama sama berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga semakin tinggi tingkat Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* maka semakin tinggi tingkat Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

### **REFERENSI**

Antikasari. (2020). Determinan Kinerja Keuangan Yang Ditinjau Dari Good Corporate Governance, Leverage dan Ukuran Perusahaan (Sub. Sector Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di BEI tahun 2013-2018). 336-345. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 336-345. <https://doi.org/doi:10.33395/owner.v4i2.208>

- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v3i1.274>
- Arifudin, O. (2021). Implementasi Balanced Scorecard dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi World Class. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 767–775. <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.2333>
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sj.v1i3.39>
- Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fitriani. (2022). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Whistleblowing System Dan Kesadaran Anti-Fraud. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 140–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.738>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlita. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1805–1830. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.628>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138>
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistleblower System-WBS)*. Jakarta: KNKG.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Maulida. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275-294. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Pope. (2007). *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Saputra. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 286–295. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.239>
- Silaen, N. R. (2021). *Kinerja Karyawan*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sulistiyono & Yanti. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Risiko Dan Wistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 601–611. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i1.6016>
- Surtikanti & Larasati. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *JAFTA*, 1(1), 31–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21460/jrak.2022.182.423>
- Syafidinal. (2019). Effect of Whistleblowing System and Effectiveness of Internal Audit on Good Governance Practices: Case study of BUMN Companies in Bandung Indonesia. *Global Business & Management Research*, 11(1), 321-326. <https://doi.org/https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.751>
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2719>

- Wahyuni. (2018). Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, 6(1), 189-194. <https://doi.org/https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>
- Wardana. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem whistleblowing dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 23-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.12161>
- Zarlis. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud di Rumah Sakit. *Jurnal Transparansi*, 1(2), 206-217. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.304>